



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310
TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : 12255/PP.08.01/Dt.9.3/T/10/2021 Jakarta, 1 Oktober 2021
Lampiran : Dua Berkas
Hal : Undangan *Focus Group Discussion*
Pendalaman Daerah *Review Major Project*

Yth.

(Daftar Terlampir)

di tempat

Dalam rangka memberikan rekomendasi kebijakan *Major Project*, Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan melalui Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah melaksanakan *review* terhadap *Major Project* (MP) dalam RKP 2021. *Review* dilaksanakan pada 5 MP terpilih yaitu: (1) MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (studi kasus DPP Danau Toba); (2) MP 9 Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 Smelter (studi kasus KIT Batang); (3) MP *Food Estate* (studi kasus *Food Estate* Kalimantan Tengah); (4) MP Pembangunan Wilayah Batam-Bintan; serta (5) MP Pusat Kegiatan Strategis Nasional (Studi Kasus PKSN Paloh Aruk). Dalam rangka mendapatkan perspektif yang lebih baik mengenai kebijakan, perkembangan pelaksanaan, pendalaman studi kasus daerah, maka diperlukan diskusi terfokus dengan *stakeholders* daerah yang menjadi lokus pelaksanaan MP.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Saudara untuk menghadiri diskusi yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 7 Oktober 2021
Waktu : 08.30 WIB – selesai
Tempat : Ruangan masing-masing
Meeting ID : 940 5422 1041 *passcode*: EPD21
Agenda : Terlampir

Hal-hal lain yang perlu dikoordinasikan dapat menghubungi Sdr. Rudika (082244442717) atau Sdr. Myza (085742451951). Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan Daerah



Agustin Arry Yanna

Tembusan Yth.:

Bapak Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan

Lampiran I

Nomor : 12255/PP.08.01/Dt.9.3/T/10/2021

Tanggal : 1 Oktober 2021

DAFTAR PENERIMA UNDANGAN

Penanggungjawab *Major Project*

1. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, selaku penanggungjawab MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas; dan MP 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter
2. Direktur Pangan dan Pertanian, selaku penanggungjawab MP *Food Estate*
3. Direktur Regional I, selaku penanggungjawab MP Pembangunan Wilayah Batam-Bintan
4. Direktur Regional II, selaku penanggungjawab MP PKSN

MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) – Danau Toba:

1. Kepala Bappeda Kabupaten Dairi
2. Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Utara
3. Kepala Bappeda Kabupaten Simalungun
4. Kepala Bappeda Kabupaten Karo
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara
6. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Dairi
7. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir
8. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara
9. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun
10. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Utara
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir

MP 9 Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 Smelter – KI Batang:

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Batang
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah
4. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
6. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang
8. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
9. Dinas Perhubungan Kabupaten Batang
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
11. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang
12. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
13. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batang

MP *Food Estate* – FE Kalimantan Tengah:

1. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau

2. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kapuas
3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulang Pisau
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kabupaten Kapuas
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau
10. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah
11. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kapuas (DPPKUKM) Kabupaten Kapuas
12. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Pulang Pisau
13. Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah
14. Kepala DPMPTSP Kabupaten Kapuas
15. Kepala DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau
16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas
18. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau
19. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah
20. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas
21. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau
22. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
23. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas
24. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulang Pisau

MP Pembangunan Batam-Bintan:

1. Kepala Bapelitbangda Kota Batam
2. Kepala Bapelitbang Kabupaten Bintan
3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam
4. Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau
5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam
6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan
7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna
8. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam
9. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan

MP Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) – PKSN Paloh Aruk:

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat
3. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas
4. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat
5. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas
6. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat
7. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat
9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas

Kedeputian Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

1. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektor
2. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, & Pengendalian Pembangunan
3. Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan
4. Dr. Ir. Budhi Santoso, MA, Perencana Ahli Utama
5. Dr. Ir. Arif Haryana, M.Sc, Perencana Ahli Utama
6. Staf lingkup Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah

Tim Ahli Metodologi

1. Dr. Ir. Hania Rahma, M.Si
2. Dr. Nuva, SP, M.Sc
3. Ir. Agus Ediawan, M.Si
4. Danang Pramudita, SP., M.Si

Lampiran II

Nomor : 12255/PP.08.01/Dt.9.3/T/10/2021

Tanggal : 1 Oktober 2021

AGENDA
FOCUS GROUP DISCUSSION PENDALAMAN DAERAH
 Kamis, 7 Oktober 2021

| Agenda | | Ruang I MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) – Danau Toba | Ruang II MP 9 Kawasan Industri dan 31 Smelter – KIT Batang | Ruang III MP Food Estate – Provinsi Kalimantan Tengah | Ruang IV MP Pembangunan Wilayah Batam-Bintan | Ruang V MP PKSN – Paloh Aruk |
|---------------|---------------|---|---|---|---|---|
| Waktu | Alokasi Waktu | | | | | |
| 08.30 – 08.40 | 10 Menit | Pengantar Direktur PEPPD | | | | |
| Breakout room | | | | | | |
| 08.40 – 08.50 | 10 Menit | Pengantar Moderator (Grace S. L. Manalu) | Pengantar Moderator (Yudhie Hatmadji) | Pengantar Moderator (Novi Mulia Ayu - Koordinator Wilayah II) | Pengantar Moderator (Ika Widyawati - Koordinator Wilayah I) | Pengantar Moderator (Andi Setyo Pambudi - Koordinator Wilayah III) |
| 08.50 – 09.35 | 15 Menit | Paparan Narasumber oleh Bappeda Provinsi Sumatera Utara terkait dukungan dan kendala pelaksanaan MP 10 DPP di daerah | Paparan Narasumber Bappelitbangda Provinsi Jawa Tengah terkait dukungan dan kendala pelaksanaan MP Kawasan Industri di daerah | Paparan Narasumber Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah terkait dukungan dan kendala pelaksanaan MP Food Estate di daerah | Paparan Narasumber Barenlitbang Provinsi Kep Riau terkait dukungan dan kendala pelaksanaan MP Batam-Bintan di daerah | Paparan Narasumber Bappeda Provinsi Kalimantan Barat terkait dukungan dan kendala pelaksanaan MP PKSN di daerah |
| | 15 Menit | Paparan Narasumber Bappeda Kab Samosir terkait dukungan dan kendala pelaksanaan MP 10 DPP di daerah | Paparan Narasumber Bappelitbangda Kabupaten Batang terkait dukungan dan kendala pelaksanaan MP Kawasan Industri di daerah | Paparan Narasumber Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah terkait dukungan dan kendala pelaksanaan MP Food Estate di daerah | Paparan Narasumber Dinas Pariwisata Kep Riau terkait dukungan dan kendala pelaksanaan MP Batam-Bintan di daerah | Paparan Narasumber Bappeda Kabupaten Sambas terkait dukungan dan kendala pelaksanaan MP PKSN di daerah |
| | 15 Menit | Paparan Narasumber Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Penataan Ruang Kab Simalungun terkait dukungan dan kendala pelaksanaan MP 10 DPP di daerah | Paparan Narasumber Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Batang terkait dukungan dan kendala pelaksanaan MP Kawasan Industri di daerah | Paparan Narasumber Bappeda Kabupaten Kapuas terkait dukungan dan kendala pelaksanaan MP Food Estate di daerah | Paparan Narasumber Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Bintan terkait dukungan dan kendala pelaksanaan MP Batam-Bintan di daerah | Paparan Narasumber Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas terkait dukungan dan kendala pelaksanaan MP PKSN di daerah |
| 09.35 – 11.05 | 90 Menit | Diskusi mendalam dengan narasumber utama dan peserta terkait pelaksanaan dari MP 10 DPP – Danau Toba | Diskusi mendalam dengan narasumber utama dan peserta terkait pelaksanaan dari MP 9 Kawasan Industri dan 31 Smelter – KIT Batang | Diskusi mendalam dengan narasumber utama dan peserta terkait pelaksanaan dari MP Food Estate –Provinsi Kalimantan Tengah | Diskusi mendalam dengan narasumber utama dan peserta terkait pelaksanaan dari MP Pembangunan Wilayah Batam-Bintan | Diskusi mendalam dengan narasumber utama dan peserta terkait pelaksanaan dari MP PKSN – Paloh Aruk – Provinsi Kalimantan Barat |
| 11.05 – 11.55 | 50 Menit | Diskusi Kelengkapan Isian Kuesioner Daerah terkait MP 10 DPP – Danau Toba | Diskusi Kelengkapan Isian Kuesioner Daerah terkait MP Kawasan Industri Batang | Diskusi Kelengkapan Isian Kuesioner Daerah terkait MP Food Estate – Paloh Aruk | Diskusi Kelengkapan Isian Kuesioner Daerah terkait MP Batam-Bintan | Diskusi Kelengkapan Isian Kuesioner Daerah terkait MP PKSN Paloh Aruk |
| 11.55 – 12.00 | 5 Menit | Penutup | Penutup | Penutup | Penutup | Penutup |

Kerangka Acuan Kerja
FGD Pendalaman Daerah - *Review Major Project*
Tahun Anggaran 2021

1. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024 sangat penting karena merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) periode 2005-2025. Dengan demikian, pencapaian target pembangunan pada RPJMN periode 2020-2024 menjadi sangat krusial. Untuk itu, dalam rangka mempercepat dan mewujudkan sasaran pembangunan tersebut, maka sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024, pemerintah menyusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran pembangunan.

Pada RPJMN 2020-2024, terdapat 41 *Major Project* (selanjutnya disingkat MP) yang terdiri dari berbagai proyek yang pendanaannya bersumber dari Kementerian/Lembaga (K/L), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pemerintah Daerah, dan lainnya. MP tersebut akan menjadi acuan dalam penekanan kebijakan dan pendanaan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya. Namun dalam pelaksanaannya, pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020 telah memberikan dampak pada semua sektor pembangunan sehingga berpotensi memberikan pengaruh dalam pelaksanaan dan pencapaian target MP tahunan yang telah ditetapkan. Untuk itu pada RKP 2021, mempertimbangkan kondisi yang berkembang, ditetapkan 2 MP tambahan yaitu *Food Estate* dan Penguatan Sistem Kesehatan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kedeputan Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan (PEPP) melalui Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah (PEPPD) menginisiasi untuk melakukan kegiatan studi kasus evaluasi *on-going/review* MP terpilih. Adapun kelima studi kasus MP tersebut terdiri dari: (1) MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP); (2) MP 9 Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 *Smelter*; (3) MP *Food Estate*; (4) MP Pembangunan Wilayah Batam-Bintan; serta (5) MP Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). *Review* mencakup hal sebagai berikut:

Gambar 1. Cakupan Review Major Project

1. Desain Kebijakan

- Perkembangan kebijakan 5 *major project* terpilih dalam dokumen perencanaan

2. Perkembangan Pelaksanaan

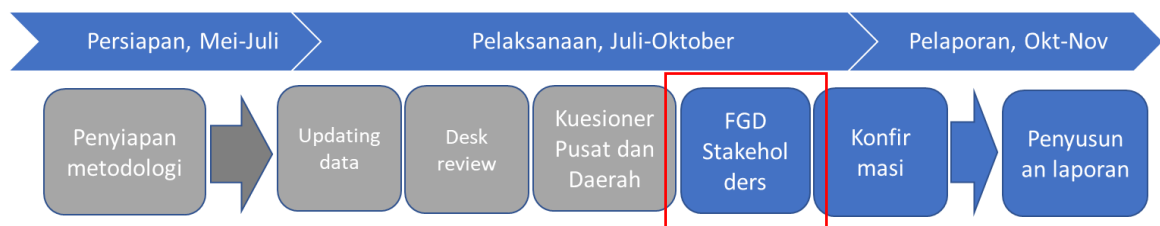
- Menelaah perkembangan pelaksanaan dari sisi koordinasi dan kelembagaan, kerangka monevdl, kinerja pelaksanaan, dan keberlanjutan pelaksanaan akibat COVID-19

3. Studi Kasus Daerah

- Pendalaman 5 MP dan *ownership* daerah: DPP Danau Toba, KI Batang, FE Kalimantan Tengah, Pembangunan Wilayah Batam-Bintan, PKS Paloh Aruk

Review MP pada studi kasus daerah ditekankan pada pendalaman kriteria relevansi, koherensi, efektivitas, keberlanjutan MP di daerah, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pusat-daerah, kendala yang dihadapi dari perspektif daerah sebagai penerima manfaat MP serta mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari hasil isian kuesioner yang telah dikirimkan sebelumnya.

Gambar 2. Tahapan Pelaksanaan Review



Sehubungan dengan adanya pandemi COVID, pelaksanaan telaah dilakukan dengan *full desk review*, pengumpulan kuesioner Pusat/Bappenas dan Daerah serta FGD daring dengan *stakeholders* K/L/D. Dalam rangka mendapatkan perspektif yang lebih baik mengenai kebijakan, perkembangan pelaksanaan, pendalaman studi kasus daerah, maka diperlukan diskusi terfokus dengan *stakeholders* K/L/D dan lainnya yang terkait sehingga informasi yang didapatkan menjadi lebih komprehensif. FGD Pendalaman kedua dilakukan dengan para *stakeholders* di lingkup pemerintah daerah terutama pada OPD yang relevan dengan MP terkait. Adapun dalam pelaksanaannya, FGD Pendalaman daerah ini turut mengundang *stakeholders* lain yang relevan untuk memperkaya dan memperdalam informasi.

2. Tujuan dan Hasil yang Diharapkan

Tujuan pelaksanaan FGD Pendalaman Daerah ini yaitu:

1. Mendapatkan perspektif dan informasi dari narasumber daerah terkait :
 - a. Kebijakan, pola koordinasi dan kelembagaan, mekanisme monitoring, evaluasi dan pengendalian (monevdl), dan keberlanjutan pelaksanaan akibat pandemi COVID-19 MP secara umum dan pada studi kasus daerah.

- b. Pendalaman studi kasus daerah pada tiap *major project* baik dari dukungan maupun kendala pelaksanaan.
2. Mengkonfirmasi dan mendapatkan informasi lebih lanjut dari isian kuesioner daerah *Review Major Project* oleh peserta dari OPD di daerah pelaksanaan MP terkait.

3. Rencana Pelaksanaan

a. Tempat Pelaksanaan

Kegiatan FGD Pendalaman Daerah *Review Major Project* dilaksanakan secara *virtual* melalui *Zoom Meeting*. ID Meeting untuk masing-masing daerah terlampir dalam agenda.

b. Agenda Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui *zoom meeting* dengan informasi pelaksanaan sebagai berikut:

| | |
|--------------|---|
| Hari/Tanggal | : Kamis, 7 Oktober 2021 |
| Waktu | : 08.30 WIB – selesai |
| Tempat | : Ruang masing-masing |
| Meeting ID | : 940 5422 1041 <i>passcode</i> : EPD21 |

Berikut adalah pembagian alokasi waktu untuk masing-masing sesi.

Tabel 1. Alokasi Waktu Pembicara

| Alokasi Waktu | Agenda | PIC |
|--------------------------|--|--|
| 10 Menit | Pembukaan dan Pengantar | Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah |
| Breakout Room | | |
| 10 Menit | Pengantar mekanisme <i>breakout room</i> | PIC <i>Review Major Project</i> Dit. PEPPD |
| 45 Menit (@ 15 menit) | Paparan <i>Stakeholders</i> | (1) <i>Stakeholder</i> Daerah MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas; (2) <i>Stakeholder</i> Daerah MP 9 Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 <i>Smelter</i> ; (3) <i>Stakeholder</i> Daerah MP <i>Food Estate</i> ; (4) <i>Stakeholder</i> Daerah MP Pembangunan Wilayah Batam-Bintan; serta (5) <i>Stakeholder</i> Daerah MP Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). |

| Alokasi Waktu | Agenda | PIC |
|---------------|---|--|
| 90 menit | Diskusi dan tanggapan terhadap paparan narasumber | Seluruh Peserta |
| 50 menit | Diskusi kelengkapan isian kuesioner | Seluruh Peserta |
| 5 Menit | Penutup | PIC <i>Review Major Project</i> Dit. PEPPD |

*Jadwal pelaksanaan FGD Pendalaman *Review* MP secara keseluruhan sebagaimana terlampir.

c. ¹Narasumber Utama

Narasumber utama kegiatan merupakan *stakeholders* daerah terutama perwakilan pelaksana MP terkait yang berasal dari OPD pelaksana utama yang relevan.

Tabel 2. Kisi Paparan Pembicara

| No | Major Project | Narasumber | Kisi Paparan Pembicara |
|----|---|---------------------------------|---|
| 1 | MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) – Danau Toba | Bappeda Provinsi Sumatera Utara | <ol style="list-style-type: none"> 1. Arah kebijakan pengembangan wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terkait dengan MP DPP Danau Toba dalam RKPD dan RPJMD 2. Peran strategis dan keterlibatan pemda Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan MP DPP Danau Toba 3. Mekanisme koordinasi perencanaan dan pelaksanaan MP DPP Danau Toba antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga), BPODT, masyarakat dan swasta dalam pengembangan DPP Danau Toba 4. Regulasi dan kelembagaan daerah pendukung MP DPP Danau Toba 5. Kegiatan-Subkegiatan lintas OPD beserta alokasi dalam mendukung pelaksanaan MP DPP Danau Toba dari berbagai sumber pendanaan 6. Dampak COVID-19 terhadap pelaksanaan MP DPP Danau Toba 7. Kendala dan tantangan yang dihadapi dan upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut 8. Manfaat dan harapan pelaksanaan MP ke depan serta strategi yang perlu dilakukan untuk mewujudkan harapan tersebut |

¹ Unsur stakeholders daerah FGD Pendalaman disesuaikan dengan kebutuhan informasi dari masing-masing MP

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | Bappeda Kabupaten Samosir | <ol style="list-style-type: none"> 1. Arah kebijakan pengembangan Kabupaten Samosir yang terkait dengan MP DPP Danau Toba 2. Peran strategis dan keterlibatan kabupaten Samosir dalam pengembangan MP DPP Danau Toba 3. Regulasi dan kelembagaan daerah pendukung MP DPP Danau Toba 4. Mekanisme koordinasi perencanaan dan pelaksanaan MP DPP Danau Toba antara pemerintah daerah kabupaten Samosir dengan pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga), pemerintah daerah provinsi, BPODT, masyarakat dan swasta dalam pengembangan DPP Danau Toba 5. Kegiatan-SubKegiatan lintas OPD beserta alokasi dalam mendukung pelaksanaan MP DPP Danau Toba dari berbagai sumber pendanaan 6. Dampak COVID-19 terhadap pelaksanaan pengembangan DPP Danau Toba 7. Kendala dan tantangan yang dihadapi dan upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut 8. Manfaat dan harapan pelaksanaan MP ke depan serta strategi yang perlu dilakukan untuk mewujudkan harapan tersebut |
| | | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Penataan Ruang Kabupaten Simalungun | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran strategis, dan keterlibatan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Penataan Ruang Kabupaten Simalungun dalam pelaksanaan MP DPP Danau Toba 2. Mekanisme koordinasi perencanaan dan pelaksanaan MP DPP Danau Toba antara Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Penataan Ruang Kabupaten Simalungun dengan pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga), pemerintah daerah provinsi, BPODT, masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan MP DPP Danau Toba 3. Kegiatan-Subkegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Penataan Ruang Kab Simalungun beserta alokasi dalam mendukung |

| | | | |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | <p>pelaksanaan MP DPP Danau Toba dari berbagai sumber pendanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Dampak COVID-19 terhadap pelaksanaan pengembangan DPP Danau Toba 5. Kendala dan tantangan yang dihadapi dan upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut 6. Manfaat dan harapan pelaksanaan MP ke depan serta strategi yang perlu dilakukan untuk mewujudkan harapan tersebut |
| 2 | MP Kawasan Industri - KIT Batang | Bappelitbangda Provinsi Jawa Tengah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Arah kebijakan pengembangan wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terkait dengan MP Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang dalam RKPD dan RPJMD 2. Peran strategis dan keterlibatan pemda provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan MP KIT Batang 3. Regulasi dan kelembagaan daerah pendukung MP KIT Batang 4. Mekanisme koordinasi perencanaan dan pelaksanaan MP KIT Batang antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga), masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan MP KIT Batang 5. Kegiatan-Subkegiatan lintas OPD beserta alokasi dalam mendukung pelaksanaan MP KIT Batang dari berbagai sumber pendanaan 6. Dampak COVID-19 terhadap pelaksanaan MP KIT Batang 7. Progres dukungan daerah pada level Provinsi terhadap KIT Batang diantaranya meliputi revisi RTRW, status pengadaan Lahan di lokasi KIT Batang 8. Mitigasi dan pengendalian risiko pelaksanaan kegiatan di lokasi MP meliputi; risiko konflik di lapangan (lahan), risiko kerusakan SDALH 9. Kesesuaian MP KIT Batang dengan kebutuhan atau isu strategis di Provinsi Jawa Tengah 10. Kendala dan tantangan yang dihadapi dan upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | 11. Manfaat dan harapan pelaksanaan MP ke depan serta strategi yang perlu dilakukan untuk mewujudkan harapan tersebut |
| | | Bappelitbangda Kabupaten Batang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Arah kebijakan pengembangan wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terkait dengan MP KIT Batang dalam RKPD dan RPJMD 2. Peran strategis, dan keterlibatan pemda kabupaten Batang dalam pengembangan MP KIT Batang 3. Regulasi dan kelembagaan daerah pendukung MP KIT Batang 4. Mekanisme koordinasi perencanaan dan pelaksanaan MP KIT Batang antara pemerintah daerah kabupaten Batang dengan pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga), Pengelola KIT Batang, masyarakat dan swasta dalam pengembangan KIT Batang 5. Kegiatan-Subkegiatan lintas OPD beserta alokasi dalam mendukung pelaksanaan MP KIT Batang dari berbagai sumber pendanaan 6. Dampak COVID-19 terhadap pelaksanaan pengembangan KIT Batang 7. Mitigasi dan pengendalian risiko pelaksanaan kegiatan di lokasi MP meliputi; risiko konflik di lapangan (lahan), risiko kerusakan SDALH (banjir) 8. Kesesuaian pembangunan KIT Batang dengan kebutuhan atau isu strategis di kabupaten Batang 9. Kendala dan tantangan yang dihadapi dan upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut 10. Manfaat dan harapan pelaksanaan MP ke depan serta strategi yang perlu dilakukan untuk mewujudkan harapan tersebut |
| | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran strategis dan keterlibatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang dalam pelaksanaan KIT Batang 2. Mekanisme koordinasi perencanaan dan pelaksanaan MP KIT Batang antara pemerintah pusat |

| | | | |
|---|-----------------------|---|---|
| | | | <p>(Kementerian/Lembaga), pemerintah daerah, pengelola KIT Batang, masyarakat dan swasta dalam pengembangan KIT Batang</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Mitigasi dan pengendalian risiko pelaksanaan kegiatan di lokasi MP meliputi; risiko konflik di lapangan (lahan), risiko kerusakan SDALH 4. Kegiatan-Subkegiatan Dinas PUPR Kabupaten Batang beserta alokasi dalam mendukung pelaksanaan MP KIT Batang dari berbagai sumber pendanaan 5. Dampak COVID-19 terhadap pelaksanaan pengembangan KIT Batang 6. Infrastruktur prioritas yang perlu dikembangkan dalam mendukung kelengkapan infrastruktur KIT Batang 7. Kendala dan tantangan yang dihadapi dan upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut 8. Manfaat dan harapan pelaksanaan MP ke depan serta strategi yang perlu dilakukan untuk mewujudkan harapan tersebut |
| 3 | MP <i>Food Estate</i> | Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Arah kebijakan pengembangan wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terkait dengan MP <i>Food Estate</i> (FE) dalam RKPD dan RPJMD 2. Peran strategis dan keterlibatan pemda provinsi Kalimantan Tengah dalam pengembangan MP <i>Food Estate</i> 3. Regulasi dan kelembagaan daerah pendukung MP <i>Food Estate</i> 4. Mekanisme koordinasi perencanaan dan pelaksanaan MP FE antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga), masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan MP <i>Food Estate</i> 5. Kegiatan-Subkegiatan lintas OPD beserta alokasi dalam mendukung pelaksanaan MP FE dari berbagai sumber pendanaan |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 6. Dampak COVID-19 terhadap pelaksanaan pengembangan <i>Food Estate</i> di Provinsi Kalimantan Tengah 7. Mitigasi dan pengendalian risiko pelaksanaan kegiatan di lokasi MP (konflik lahan, potensi sumber daya air, ketenagakerjaan) 8. Kesesuaian <i>Food Estate</i> dengan kebutuhan atau isu strategis di daerah maupun dokumen perencanaan yang ada seperti RTRW 9. Ketersediaan prasarana dan sarana budidaya pertanian, jalan usaha tani, pasca panen 10. Kendala dan tantangan yang dihadapi dan upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut 11. Manfaat dan harapan pelaksanaan MP ke depan serta strategi yang perlu dilakukan untuk mewujudkan harapan tersebut |
| | | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran strategis dan keterlibatan Dinas TPHP daerah dalam pelaksanaan MP <i>Food Estate</i> 2. Mekanisme koordinasi perencanaan dan pelaksanaan MP FE antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga), pemerintah daerah, dinas terkait, masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan MP <i>Food Estate</i> 3. Kegiatan-Subkegiatan Dinas TPHP beserta alokasi dalam mendukung pelaksanaan MP FE dari berbagai sumber pendanaan 4. Dampak COVID-19 terhadap pelaksanaan MP <i>Food Estate</i> 5. Pengembangan SDM petani dan penyuluh di lokasi 6. Mitigasi dan pengendalian risiko pelaksanaan kegiatan di lokasi MP (kesesuaian lahan, potensi sumber daya air, serangan hama, dll) 7. Kendala dan tantangan yang dihadapi dan upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut 8. Manfaat dan harapan pelaksanaan MP ke depan serta strategi yang perlu |

| | | | |
|--|--|--------------------------|---|
| | | | dilakukan untuk mewujudkan harapan tersebut |
| | | Bappeda Kabupaten Kapuas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Arah kebijakan pengembangan wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terkait dengan MP <i>Food Estate</i> dalam RKPD dan RPJMD 2. Peran strategis dan keterlibatan pemerintah Kabupaten Kapuas dalam pengembangan MP <i>Food Estate</i> 3. Regulasi dan kelembagaan daerah pendukung pelaksanaan MP <i>Food Estate</i> 4. Mekanisme koordinasi perencanaan dan pelaksanaan MP FE antara pemerintah Kabupaten Kapuas dengan pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga), pemerintah daerah provinsi, dinas terkait, masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan MP <i>Food Estate</i> 5. Kegiatan-Subkegiatan lintas OPD beserta alokasi dalam mendukung pelaksanaan MP FE dari berbagai sumber pendanaan 6. Dampak COVID-19 terhadap pelaksanaan pengembangan <i>food estate</i> 7. Mitigasi dan pengendalian risiko pelaksanaan kegiatan di lokasi MP (kesesuaian lahan, potensi sumber daya air, serangan hama, dan sebagainya) 8. Kesesuaian pembangunan <i>Food Estate</i> dengan kebutuhan atau isu strategis daerah Kabupaten Kapuas 9. Kendala dan tantangan yang dihadapi dan upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. 10. Manfaat dan harapan pelaksanaan MP ke depan serta strategi yang perlu dilakukan untuk mewujudkan harapan tersebut |

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|
| 4 | MP Pembangunan Wilayah Batam Bintan | Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau | <ol style="list-style-type: none"> 1. Arah kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota yang terkait dengan MP Pembangunan Wilayah Batam-Bintan dalam RKPD dan RPJMD 2. Peran strategis dan keterlibatan Provinsi Kepulauan Riau dalam pengembangan MP Pembangunan Wilayah Batam-Bintan 3. Regulasi dan kelembagaan pendukung pelaksanaan MP Pembangunan Wilayah Batam Bintan 4. Mekanisme koordinasi perencanaan dan pelaksanaan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga), masyarakat dan swasta dalam pembangunan Kawasan Batam-Bintan 5. Kegiatan-Subkegiatan lintas OPD beserta alokasi dalam mendukung pelaksanaan MP Pembangunan Wilayah Batam-Bintan dari berbagai sumber pendanaan 6. Dampak COVID-19 terhadap pelaksanaan pengembangan MP Pembangunan Wilayah Batam-Bintan 7. Promosi dan fasilitasi investasi di Kawasan Batam-Bintan 8. Mitigasi dan pengendalian risiko pelaksanaan kegiatan di lokasi MP Pembangunan Wilayah Batam-Bintan 9. Kesesuaian MP Pembangunan Wilayah Batam-Bintan dengan kebutuhan atau isu strategis di daerah 10. Kendala dan tantangan yang dihadapi dan upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut 11. Manfaat dan harapan pelaksanaan MP ke depan serta strategi yang perlu dilakukan untuk mewujudkan harapan tersebut |
| | | Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran strategis dan keterlibatan Dinas Pariwisata Prov Kepri dalam pelaksanaan MP Pembangunan Wilayah Batam-Bintan 2. Mekanisme koordinasi perencanaan dan pelaksanaan MP Batam-Bintan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>(Kementerian/Lembaga), masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan MP Pembangunan Wilayah Batam-Bintan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kegiatan-Subkegiatan Dinas Pariwisata Prov Kepri beserta alokasi dalam mendukung pelaksanaan MP Pembangunan Wilayah Batam-Bintan dari berbagai sumber pendanaan 4. Dampak COVID-19 terhadap pelaksanaan pembangunan wilayah Batam-Bintan 5. Kendala dan tantangan yang dihadapi dan upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut 6. Manfaat dan harapan pelaksanaan MP ke depan serta strategi yang perlu dilakukan untuk mewujudkan harapan tersebut |
| | | 12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran strategis dan keterlibatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan dalam pengembangan MP Pembangunan Wilayah Batam-Bintan 2. Mekanisme koordinasi perencanaan dan pelaksanaan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga), pemerintah provinsi, masyarakat dan swasta dalam pembangunan Kawasan Batam-Bintan 3. Kegiatan-Subkegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan beserta alokasi dalam mendukung pelaksanaan MP Pembangunan Wilayah Batam-Bintan dari berbagai sumber pendanaan 4. Dampak COVID-19 terhadap pelaksanaan pengembangan MP Pembangunan Wilayah Batam-Bintan 5. Dukungan daerah Kabupaten Bintan untuk menunjang pembangunan pariwisata di Kabupaten Bintan (Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas) 6. Mitigasi dan pengendalian risiko pelaksanaan kegiatan di lokasi MP 7. Kesesuaian MP Pembangunan Wilayah Batam-Bintan dengan kebutuhan atau isu strategis di daerah |

| | | | |
|---|--------------------|-----------------------------------|---|
| | | | 8. Kendala dan tantangan yang dihadapi dan upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut 9. Manfaat dan harapan pelaksanaan MP ke depan serta strategi yang perlu dilakukan untuk mewujudkan harapan tersebut |
| 5 | MP PKSN Paloh Aruk | Bappeda Provinsi Kalimantan Barat | 1. Arah kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota yang terkait dengan MP PKSN Paloh Aruk dalam RKPD dan RPJMD 2. Peran strategis dan keterlibatan pemda Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan MP PKSN Paloh Aruk 3. Regulasi dan kelembagaan daerah pendukung MP PKSN 4. Mekanisme koordinasi perencanaan dan pelaksanaan PKSN Paloh Aruk antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga), masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan MP PKSN 5. Kegiatan-Subkegiatan lintas OPD beserta alokasi dalam mendukung pelaksanaan MP PKSN Paloh Aruk dari berbagai sumber pendanaan 6. Dampak COVID-19 terhadap pelaksanaan MP PKSN Paloh Aruk 7. Kesesuaian program daerah dalam pelaksanaan penyusunan rencana induk pengembangan kawasan perbatasan atau terkait MP PKSN Paloh Aruk 8. Kendala dan tantangan yang dihadapi dan upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut 9. Manfaat dan harapan pelaksanaan MP ke depan serta strategi yang perlu dilakukan untuk mewujudkan harapan tersebut |
| | | Bappeda Kabupaten Sambas | 1. Arah kebijakan pengembangan wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terkait dengan MP PKSN Paloh Aruk dalam RKPD dan RPJMD |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Peran strategis dan keterlibatan Kabupaten Sambas dalam pelaksanaan MP PKSN Paloh Aruk 3. Regulasi dan kelembagaan daerah pendukung MP PKSN Paloh Aruk 4. Mekanisme koordinasi perencanaan dan pelaksanaan MP antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga), pemerintah provinsi, Badan Pengelola Perbatasan Paloh Aruk, masyarakat dan swasta dalam pengembangan PKSN Paloh Aruk 5. Kegiatan-Subkegiatan lintas OPD beserta alokasi dalam mendukung pelaksanaan MP PKSN Paloh Aruk dari berbagai sumber pendanaan 6. Dampak COVID-19 terhadap pelaksanaan pembangunan MP PKSN Paloh Aruk 7. Kendala dan tantangan yang dihadapi dan upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut 8. Manfaat dan harapan pelaksanaan MP ke depan serta strategi yang perlu dilakukan untuk mewujudkan harapan tersebut |
| | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran strategis dan keterlibatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas dalam pelaksanaan MP PKSN Paloh Aruk 2. Mekanisme koordinasi perencanaan dan pelaksanaan PKSN Paloh Aruk antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga), masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan MP PKSN 3. Kegiatan-Subkegiatan Dinas PUPR Kabupaten Sambas beserta alokasi dalam mendukung pelaksanaan MP PKSN Paloh Aruk dari berbagai sumber pendanaan 4. Dampak COVID-19 terhadap pelaksanaan pengembangan PKSN Paloh Aruk |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | 5. Kendala dan tantangan yang dihadapi dan upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut 6. Manfaat dan harapan pelaksanaan MP ke depan serta strategi yang perlu dilakukan untuk mewujudkan harapan tersebut |
|--|--|--|--|

d. Peserta

Peserta FGD Pendalaman *Review Major Project* yaitu *stakeholders* daerah yang berasal dari berbagai OPD dari MP terkait, para Penanggung jawab *Major Project* di Kementerian PPN/Bappenas Direktorat di Kedeputan PEPP, serta para staf internal Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah. Para peserta yang berasal dari berbagai *stakeholders* ini diharapkan dapat mengkonfirmasi maupun memberikan informasi yang dialami mengenai kebijakan yang mendukung pelaksanaan dari *Major Project* terpilih.

e. Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pendalaman Daerah *Review Major Project* tahun 2021 dilaksanakan dengan mekanisme *Focus Group Discussion* dengan narasumber utama yang terdiri dari *stakeholders* daerah sebagai OPD pelaksana utama serta turut melibatkan para OPD pendukung lainnya yang terkait dengan masing-masing MP tersebut sebagai peserta. Dalam pelaksanaannya seluruh peserta diharapkan menghadiri pembukaan kegiatan sebelum memasuki masing-masing ruang *virtual* melalui mekanisme *breakout room* yang telah dibagi berdasarkan MP masing-masing.

4. PENDANAAN

Pembiayaan kegiatan ini akan dibebankan pada anggaran Kementerian PPN/Bappenas tahun anggaran 2021.

5. PENUTUP

Kerangka Acuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan FGD Pendalaman Daerah *Review Major Project* ini, sehingga acara dapat berjalan lancar dan tujuan acara dapat tercapai.

AGENDA PELAKSANAAN FGD PENDALAMAN DAERAH - REVIEW MAJOR PROJECT
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021
Kamis, 7 Oktober 2021

| ID Meeting: 940 5422 1041 Password: EPD | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| Waktu | Agenda | | | | |
| 08.15 -08.30 | Regitrasi | | | | |
| 08.30 – 08.40 | Pengantar Direktur PEPPD | | | | |
| ² Breakout Room | | | | | |
| Waktu | Ruang I | Ruang II | Ruang III | Ruang IV | Ruang V |
| 08.40 – 12.00 WIB | MP 10 Destinasi Paruwisata Prioritas – Danau Toba | MP 9 Kawasan Industri dan 31 Smelter – KIT Batang | MP <i>Food Estate</i> – Provinsi Kalimantan Tengah | MP Pembangunan Wilayah Batam-Bintan | MP Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) – Paloh Aruk, Kalimantan Barat |
| Alokasi Waktu | Agenda | | | PIC | |
| 10 Menit | Pengantar moderator | | | PIC <i>Review Major Project</i> Dit PEPPD | |
| @15 Menit | Paparan Narasumber Utama terkait dukungan dan kendala pelaksanaan MP di daerah | | | Narasumber Daerah Utama | |
| 90 Menit | Diskusi dan tanggapan terhadap paparan narasumber | | | Seluruh Peserta | |
| 55 Menit | Diskusi Kelengkapan Isian Kuesioner Daerah | | | Seluruh Peserta | |
| 5 Menit | Penutup | | | PIC <i>Review Major Project</i> Dit PEPPD | |

² Tata cara masuk/join kedalam Breakoutroom pada aplikasi Zoom Meeting:

1. Klik fitur "*Breakout Rooms*" yang ada di samping kanan ikon "*Record*";
2. Pilih dan *join* kedalam ruang virtual sesuai dengan MP masing-masing.

AGENDA PELAKSANAAN FGD PENDALAMAN DAERAH REVIEW MAJOR PROJECT
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021
Kamis, 7 Oktober 2021

| Agenda | | Ruang I MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) – Danau Toba | Ruang II MP 9 Kawasan Industri dan 31 Smelter – KIT Batang | Ruang III MP <i>Food Estate</i> – Provinsi Kalimantan Tengah | Ruang IV MP Pembangunan Wilayah Batam-Bintan | Ruang V MP PKSN – Paloh Aruk |
|---------------|---------------|---|---|--|---|---|
| Waktu | Alokasi Waktu | | | | | |
| 08.30 – 08.40 | 10 Menit | Pengantar Direktur PEPPD | | | | |
| Breakout room | | | | | | |
| 08.40 – 08.50 | 10 Menit | Pengantar Moderator (Grace S. L. Manalu) | Pengantar Moderator (Yudhie Hatmadji) | Pengantar Moderator (Novi Mulia Ayu - Koordinator Wilayah II) | Pengantar Moderator (Ika Widyawati - Koordinator Wilayah I) | Pengantar Moderator (Andi Setyo Pambudi - Koordinator Wilayah III) |
| 08.50 – 09.35 | 15 Menit | Paparan Narasumber oleh Bappeda Provinsi Sumatera Utara terkait dukungan dan kendala pelaksanaan MP 10 DPP di daerah | Paparan Narasumber Bappelitbangda Provinsi Jawa Tengah terkait dukungan dan kendala pelaksanaan MP Kawasan Industri di daerah | Paparan Narasumber Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah terkait dukungan dan kendala pelaksanaan MP <i>Food Estate</i> di daerah | Paparan Narasumber Barenlitbang Provinsi Kep Riau terkait dukungan dan kendala pelaksanaan MP Batam-Bintan di daerah | Paparan Narasumber Bappeda Provinsi Kalimantan Barat terkait dukungan dan kendala pelaksanaan MP PKSN di daerah |
| | 15 Menit | Paparan Narasumber Bappeda Kab Samosir terkait dukungan dan kendala pelaksanaan MP 10 DPP di daerah | Paparan Narasumber Bappelitbangda Kabupaten Batang terkait dukungan dan kendala pelaksanaan MP Kawasan Industri di daerah | Paparan Narasumber Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah terkait dukungan dan kendala pelaksanaan MP <i>Food Estate</i> di daerah | Paparan Narasumber Dinas Pariwisata Kep Riau terkait dukungan dan kendala pelaksanaan MP Batam-Bintan di daerah | Paparan Narasumber Bappeda Kabupaten Sambas terkait dukungan dan kendala pelaksanaan MP PKSN di daerah |
| | 15 Menit | Paparan Narasumber Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Penataan Ruang Kab Simalungun terkait dukungan dan kendala pelaksanaan MP 10 DPP di daerah | Paparan Narasumber Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Batang terkait dukungan dan kendala pelaksanaan MP Kawasan Industri di daerah | Paparan Narasumber Bappeda Kabupaten Kapuas terkait dukungan dan kendala pelaksanaan MP <i>Food Estate</i> di daerah | Paparan Narasumber Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Bintan terkait dukungan dan kendala pelaksanaan MP Batam-Bintan di daerah | Paparan Narasumber Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas terkait dukungan dan kendala pelaksanaan MP PKSN di daerah |
| 09.35 – 11.05 | 90 Menit | Diskusi mendalam dengan narasumber utama dan peserta terkait pelaksanaan dari MP 10 DPP – Danau Toba | Diskusi mendalam dengan narasumber utama dan peserta terkait pelaksanaan dari MP 9 Kawasan Industri dan 31 Smelter – KIT Batang | Diskusi mendalam dengan narasumber utama dan peserta terkait pelaksanaan dari MP <i>Food Estate</i> –Provinsi Kalimantan Tengah | Diskusi mendalam dengan narasumber utama dan peserta terkait pelaksanaan dari MP Pembangunan Wilayah Batam-Bintan | Diskusi mendalam dengan narasumber utama dan peserta terkait pelaksanaan dari MP PKSN – Paloh Aruk – Provinsi Kalimantan Barat |
| 11.05 – 11.55 | 50 Menit | Diskusi Kelengkapan Isian Kuesioner Daerah terkait MP 10 DPP – Danau Toba | Diskusi Kelengkapan Isian Kuesioner Daerah terkait MP Kawasan Industri Batang | Diskusi Kelengkapan Isian Kuesioner Daerah terkait MP <i>Food Estate</i> – Paloh Aruk | Diskusi Kelengkapan Isian Kuesioner Daerah terkait MP Batam-Bintan | Diskusi Kelengkapan Isian Kuesioner Daerah terkait MP PKSN Paloh Aruk |
| 11.55 – 12.00 | 5 Menit | Penutup | Penutup | Penutup | Penutup | Penutup |